

Ringkasan Kebijakan No. 2

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Oleh Nadia Fairuza Azzahra



Pesan Utama

- Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah.
- Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta.
- Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh.
- Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.



Kerentanan Upaya Pembelajaran Jarak Jauh Indonesia di Masa Krisis Covid-19

Per tanggal 17 April 2020, diperkirakan 91,3% atau sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia tidak dapat bersekolah karena munculnya pandemi Covid-19 (UNESCO, 2020). Dalam jumlah tersebut termasuk di dalamnya kurang lebih 45 juta siswa di Indonesia atau sekitar 3% dari jumlah populasi siswa yang terkena dampak secara global (Badan Pusat Statistik, 2020)¹.

Meluasnya penyebaran Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk menutup sekolah-sekolah dan mendorong pembelajaran jarak jauh di rumah. Berbagai inisiatif dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung meskipun tidak adanya sesi tatap muka langsung.

Teknologi, lebih spesifiknya internet, ponsel pintar, dan *laptop* sekarang digunakan secara luas untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Salah satu penyedia jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia mencatat peningkatan arus *broadband* sebesar 16% selama krisis Covid-19, yang disebabkan oleh tajamnya peningkatan penggunaan *platform* pembelajaran jarak jauh.

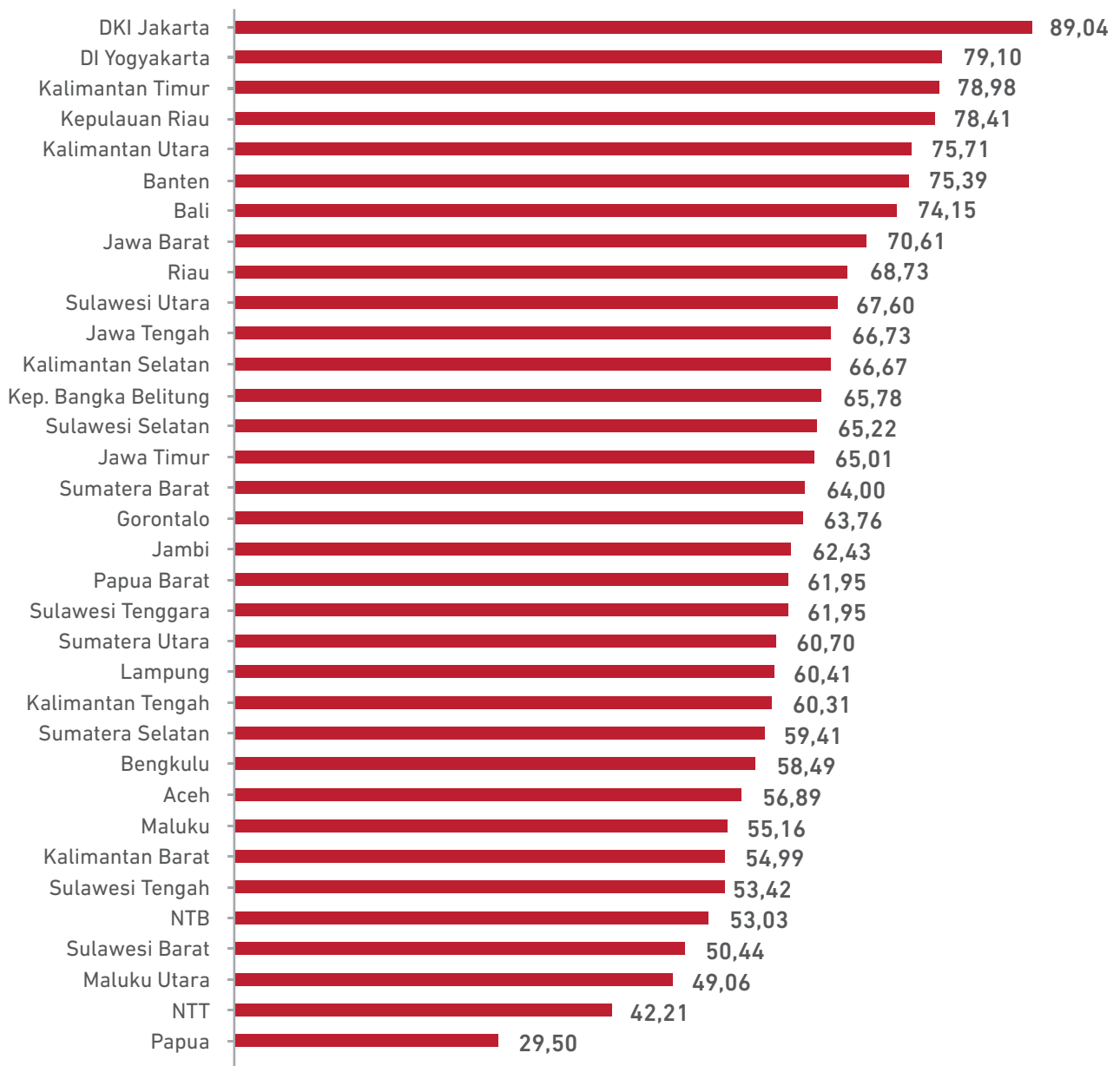
Akan tetapi, gangguan terhadap sistem pendidikan tradisional ini telah merugikan siswa-siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera dan yang berada di daerah pedesaan. Mereka adalah siswa yang, bahkan dalam kondisi normal, sudah menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan. Sekarang mereka perlu menghadapi hambatan tambahan yang muncul akibat ketidaksetaraan untuk mengakses infrastruktur teknologi.

Topografi Indonesia yang berupa kepulauan dan pegunungan membutuhkan pengadaan internet dan telekomunikasi seluler. Akan tetapi, jangkauan 4G kebanyakan terkonsentrasi di Pulau Jawa karena penyedia layanan telekomunikasi seluler, yang sangat bergantung pada pasar, tentu saja memprioritaskan daerah-daerah perkotaan ketimbang daerah pedesaan yang populasinya lebih sedikit (Khatri, 2019). Gambar 1 memperlihatkan tidak seimbangya distribusi internet rumah tangga di seluruh wilayah yang ada. Kesenjangan konektivitas tersebut membuat siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera di daerah pedesaan di luar Jawa sangat tidak diuntungkan.

Perubahan mendadak dari metode tatap muka di ruang kelas menjadi pembelajaran jarak jauh di rumah juga menunjukkan kebutuhan peningkatan kapasitas guru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) guru-guru Indonesia tidak tersebar merata di seluruh wilayah (Widodo & Riandi, 2013 dikutip dari Koh et al, 2018). Terlebih lagi, ada kesenjangan kualitas pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia, terutama antara Jawa dan luar Jawa, dan di antara kondisi-kondisi sosio-ekonomi (Azzizah, 2015; Muttaqin 2018). Akses internet yang tidak merata, kesenjangan kualifikasi guru, dan kualitas pendidikan, serta kurangnya keterampilan ICT menjadi kerentanan dalam inisiatif pembelajaran jarak jauh di Indonesia.

¹ Tidak termasuk siswa di institusi pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pesantren.

Gambar 1.
Akses Internet (persen) per Rumah Tangga di Setiap Provinsi pada 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Respons Pemerintah terhadap Krisis Covid-19

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai mengimplementasikan upaya-upaya awal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di sekolah-sekolah dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang secara garis besar menyarankan praktik higienitas dan sanitasi di sekolah-sekolah. Surat tersebut diterbitkan dua hari sebelum *World Health Organization* (WHO) menaikkan status Covid-19 menjadi pandemi global pada 11 Maret (WHO, 2020).



Oleh karena meningkatnya penyebaran, Kemendikbud kemudian memutuskan untuk menunda semua kegiatan sekolah dan beralih ke belajar daring/pembelajaran jarak jauh di rumah melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Kementerian Agama (Kemenag), yang mengawasi Madrasah, mengikuti himbauan tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-686.1/DJ.I.I/PP.00/03/2020.

Kemendikbud memberikan kebebasan bagi tiap sekolah untuk memilih *platform* belajar daring mereka (Kemendikbud, 2020a). Akan tetapi, untuk mendorong adanya proses berbagi pengetahuan, Kemendikbud menyediakan *platform* belajar daring gratis bernama "Rumah Belajar" dan sebuah *platform* untuk berbagi antar guru yang bernama "Program Guru Berbagi". "Rumah Belajar" menyediakan bahan mengajar dan fitur komunikasi untuk para penggunanya, sementara "Program Guru Berbagi" berbagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan guru-guru di seluruh Indonesia. Untuk daerah di mana koneksi internetnya tidak terlalu baik, pemerintah bekerja sama dengan TVRI, stasiun televisi negara, untuk menyampaikan materi belajar yang ada di dalam program Belajar di Rumah untuk beberapa bulan (Beritasatu, 2020).

Krisis Covid-19 juga memaksa sekolah untuk melakukan realokasi anggaran lebih besar untuk pengeluaran pembelajaran jarak jauh. Peraturan Kemendikbud Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kemenag nomor B-699/Dt.I.I/PP.03/03/2020 mengizinkan penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Termasuk juga untuk biaya koneksi internet bagi siswa dan guru serta pembelian perangkat pendukung pembelajaran jarak jauh.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, anggaran Kemendikbud dinaikkan sebesar 96%, dari Rp36 triliun menjadi Rp70,7 triliun. Penggunaan dari kenaikan besar tersebut belum dipaparkan dengan rinci, tetapi banyak pihak memprediksi dana tersebut akan digunakan untuk mendukung inisiatif pembelajaran jarak jauh lebih lanjut.

Pada tingkat pemerintah daerah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran tentang pengaturan pembelajaran jarak jauh. Pihak dinas menggunakan satu bagian khusus pada situs mereka untuk membagikan informasi tentang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, laman tersebut juga menyediakan panduan untuk menggunakan "Si Pintar by Simak", yang merupakan sistem informasi sekolah terintegrasi DKI Jakarta, di mana modul-modul pembelajaran daring dapat diakses. Situs tersebut juga menyediakan tutorial *Google Classroom* untuk para guru, program terjadwal untuk "Belajar di Rumah" di TVRI, dan *platform* belajar untuk siswa SMK bernama "WeKiddo SMK Bisa". Pemerintah daerah Jakarta juga mewajibkan kepala sekolah untuk secara berkala melaporkan perkembangan pembelajaran jarak jauh mereka.



Respons Sektor Swasta Terhadap Krisis Covid-19

Pemangku kepentingan swasta di sektor pendidikan telah menyediakan berbagai solusi siap pakai untuk mendukung implementasi pembelajaran jarak jauh. Kemendikbud memulai kerjasama dengan penyedia layanan pembelajaran daring dan perusahaan-perusahaan teknologi (Kemendikbud, 2020). Beberapa *platform* belajar telah memberikan akses gratis ke beberapa, atau bahkan semua, kontennya selama masa pandemi ini. Beberapa perusahaan telekomunikasi juga menyediakan kuota internet gratis untuk mengakses *platform* belajar daring yang tersedia (Budiansyah, 2020).

Tidak hanya sektor bisnis, tetapi sekolah-sekolah swasta juga beradaptasi dengan situasi terkini. Sekolah-sekolah swasta di daerah prasejahtera di Jakarta (Sekolah swasta murah) mengimplementasikan cara semi-daring untuk pembelajaran jarak jauh. Mereka menggunakan *platform* layanan pengiriman pesan lewat aplikasi *WhatsApp*, yang banyak digunakan di Indonesia, untuk melaksanakan diskusi kelas dan membagikan tugas serta materi belajar. Mereka yang tidak memiliki perangkat yang memadai didorong untuk meminjam ponsel pintar atau *laptop* dari kerabat mereka.

Sekolah swasta murah menarik biaya rendah untuk mendidik siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera, dan di saat yang bersamaan sekolah-sekolah ini juga tetap menjaga agar mereka tetap independen secara finansial dan tidak tergantung pada anggaran pemerintah (McLoughlin, 2013 dikutip di Rahman, 2016). Sekolah-sekolah ini seringkali terlupakan di dalam sistem pendidikan, tetapi sebenarnya mereka memainkan peranan penting dalam mengedukasi anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera dengan menyediakan pendidikan murah dan berkualitas tinggi. Sekolah swasta murah memiliki sumber daya yang sangat terbatas untuk beralih ke pembelajaran jarak jauh, oleh karena itu Kemendikbud harus memperluas jangkauannya hingga ke sekolah-sekolah ini.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah Indonesia

- **Menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kondisi regional**
Untuk melengkapi program TVRI di wilayah-wilayah yang memiliki akses internet terbatas, penyampaian materi belajar bisa dilakukan melalui radio seperti yang sudah dilakukan di negara lain seperti Argentina dan Fiji. Pemerintah Argentina menyediakan konten radio selama tujuh jam yang dibawakan oleh guru-guru berpengalaman melalui jaringan radio pemerintah selama adanya penutupan gedung sekolah, sementara itu pemerintah Fiji bekerja sama dengan dua stasiun radio untuk menyediakan pelajaran membaca dan berhitung untuk siswa kelas I sampai VIII dan juga untuk pendidikan anak usia dini (*The World Bank*, 2020). Pemerintah Indonesia juga dapat bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk membantu para guru mendistribusikan kertas lembar kerja dan modul untuk para siswa, praktik ini diambil dari pengalaman positif di Perancis (AFP, 2020).
- **Membentuk gugus kerja di daerah untuk memberikan panduan**
Dengan tidak adanya kepastian tentang akhir dari pandemi yang sedang berlangsung, Kemendikbud saat ini menyiapkan rencana pembelajaran jarak jauh hingga akhir tahun (CNN Indonesia, 2020). Meskipun kegiatan pembelajaran jarak jauh sangat tergantung pada inisiatif sekolah dan sumber informasi dari Kemendikbud, pemerintah daerah juga perlu membantu sekolah-sekolah dengan membentuk gugus kerja yang lebih lanjut menyediakan bantuan finansial di luar BOS dan akses ke studio rekaman dan peralatan untuk sekolah dan guru. Gugus kerja ini harus memberikan perhatian khusus kepada sekolah swasta murah yang memainkan peran penting dalam menyediakan pendidikan kepada kalangan prasejahtera di perkotaan yang memiliki sumber lebih sedikit dibandingkan sekolah negeri dan sekolah swasta yang lebih mapan (Rahman, 2016; Wikaningtyas, 2017).

- **Mengembangkan kerangka kerja pengawasan dan strategi untuk penggunaan BOS**

Kemendikbud perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan kerangka kerja pengawasan yang kuat untuk memonitor penggunaan BOS bagi pembelajaran jarak jauh. Pengawasan yang baik tidak hanya membantu memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan niat awal kementerian, tetapi juga untuk mengidentifikasi area-area yang paling membutuhkan bantuan. Kemendikbud juga perlu mempertimbangkan apakah ekspansi ini bersifat sementara atau apakah ada komponen yang bisa diadopsi secara permanen.

- **Memberikan otonomi lebih luas kepada kepala sekolah**

BOS sekarang dapat digunakan oleh sekolah untuk mendukung keluarga yang rentan yang sedang berjuang menghadapi pengeluaran tambahan untuk membeli paket internet dan pulsa telepon, tetapi kondisi ini baru ditetapkan satu bulan setelah dimulainya pembelajaran jarak jauh pada pertengahan Maret. Keterlambatan tersebut dapat dicegah jika kepala sekolah memiliki otonomi yang lebih luas untuk menggunakan dana BOS tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud atau Kemenag.

Otonomi yang lebih luas pada saat situasi darurat seperti krisis Covid-19 merupakan hal yang penting, terutama untuk kepala sekolah negeri. Pelaksananya membutuhkan baik fleksibilitas birokrasi maupun kapasitas pengambilan keputusan yang lebih baik oleh kepala sekolah. Mengingat Kemendikbud sudah memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada sekolah-sekolah individu, maka wewenangnya bisa diperluas lagi hingga untuk penggunaan BOS, terutama dalam keadaan darurat. Sebaliknya, Kemendikbud perlu mempertimbangkan untuk memasukkan

- **Melengkapi guru dengan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh**

Pembelajaran jarak jauh telah menjadi hambatan yang dirasakan paling luas di sektor pendidikan bahkan sebelum pandemi, namun krisis yang berlangsung saat ini mempercepat adopsi pelaksanaannya secara signifikan. Penting untuk mengikutsertakan keterampilan pembelajaran jarak jauh dalam program pelatihan guru-guru di masa yang akan datang.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah dimasukkan di dalam kurikulum pelatihan. Akan tetapi, ada keraguan terhadap efektivitasnya mengingat isinya yang mayoritas tidak relevan dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk kesuksesan adopsi pembelajaran jarak jauh, guru perlu untuk tidak hanya memiliki keterampilan teknologi dasar (seperti menggunakan komputer dan tersambung ke internet), tetapi juga pengetahuan untuk menggunakan perangkat rekaman dan perangkat lunaknya, serta metode untuk menyampaikan pelajaran tanpa interaksi tatap muka. Keterampilan tersebut akan diperlukan ketika akan menggunakan *platform* belajar daring di Indonesia. Lebih penting lagi, kesenjangan antara skenario pelatihan dan eksekusi di lapangan perlu untuk diminimalisasi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pembelajaran jarak jauh sebaiknya terintegrasi di dalam program pendidikan guru jangka panjang Kemendikbud yang disebut Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

- **Menjaga kemitraan pemerintah dan swasta di sektor pendidikan**

Kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam hal *platform* belajar daring telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun Indonesia masih harus mengatasi pemisahan digitalnya. Krisis Covid-19 dapat menjadi awal kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam skala besar untuk mengisi kesenjangan sistemik seperti yang terjadi di Hongkong. Di sana, sebuah konsorsium yang terdiri dari pemangku kepentingan dari berbagai pihak, dari organisasi pendidikan dan industri hiburan, yang memberikan materi belajar gratis selama Covid-19, telah memutuskan untuk meneruskan layanannya bahkan setelah pandemi nantinya mereda (Tan dan El Azar, 2020). Kerja sama yang serupa juga perlu dipertimbangkan di Indonesia. Terakhir, Kemendikbud dan Kemenag juga perlu mengevaluasi kelayakan kemitraan pemerintah-swasta dengan penyedia jasa teknologi dalam pengadaan infrastruktur untuk mendukung pembelajaran daring atau jarak jauh.

Infrastruktur serat optik dasar laut yang menghubungkan semua provinsi di Indonesia (Proyek Palapa Ring) belum digunakan secara maksimal, maka itu Kemendikbud dan Kemenag harus mengeksplorasi

kemungkinan untuk bermitra dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat keras guna memperlengkapi semua sekolah, terutama yang terletak di daerah terpencil, dengan koneksi internet, fasilitas informasi teknologi dan komunikasi, serta program pengembangan keterampilan bagi para guru. Dibutuhkan kreativitas untuk

mempertimbangkan format kerja sama. Di dalamnya bisa termasuk jaminan oleh kementerian untuk penggunaan jumlah minimum data seluler atau perjanjian penyewaan peralatan dalam jumlah banyak. Pelatihan informasi, teknologi, dan komunikasi untuk guru dapat menjadi bagian dari perjanjian dengan pihak penyedia.

Referensi

AFP. (2020). School Dropout: "We have lost between 5-8% of students" says Blanquer. *Le Figaro*. Diambil dari: https://etudiant.lefigaro.fr/article/decrochage-scolaire-nous-avons-perdu-entre-5-et-8-des-eleves-affirme-blanquer_fd76d3fc-7324-11ea-94e3-c0cc05dea6b9/

Azzizah, Y. (2015). Socio-Economic Factors on Indonesia Education Disparity. *International Education Studies*. 8(12). 218-230.

Budiansyah, A. (2020). Saat Operator Seluler Gratiskan 30GB Selama Corona. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200331122727-37-148727/saat-operator-seluler-gratiskan-internet-30-gb-selama-corona>

Beritasatu. (2020). Education Ministry Teams Up with TVRI to Deliver Distance Learning. *Jakarta Globe*. Diambil dari: <https://jakartaglobe.id/news/education-ministry-teams-up-with-tvri-to-deliver-distance-learning>

CNN Indonesia. (2020). Kemendikbud Buat Skenario Belajar di Rumah sampai Akhir 2020. *CNN Indonesia*. Diambil dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424114337-20-496861/kemendikbud-buat-skenario-belajar-di-rumah-sampai-akhir-2020>

Khatri, H. (2019). Indonesian users in sparsely-populated urban areas connect to 4G more than 70% of the time. *Opensignal*. Diambil dari: <https://www.opensignal.com/2019/11/12/indonesian-users-in-sparsely-populated-rural-areas-connect-to-4g-more-than-70-of-the-time>

Koh, J.H.L., Chai, C.S., Natarajan, U. (2018). Developing Indonesia teachers' technological pedagogical content knowledge for 21st century learning (TPACK-21CL) through a multi-prong approach. Auckland: *Journal of International Education and Business*, 3(1), 11-33.

McLoughlin, C. (2013) Low-Cost Private Schools: Evidence, Approaches and Emerging Issues. *University of Birmingham*. Diambil dari: http://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/Low-cost_private_schools.pdf

Ministry of Education and Culture. (2020a). Belajar dari Rumah, Satuan Pendidikan Dapat Pilih Platform Pembelajaran Jarak Jauh. *Ministry of Education and Culture*. Diambil dari: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/belajar-dari-rumah-satuan-pendidikan-dapat-pilih-platform-pembelajaran-jarak-jauh-sesuai-kebutuhan>

Ministry of Education and Culture (2020b). Kemdikbud Gandeng Swasta Siapkan Sistem Belajar Daring. *Ministry of Education and Culture*. Diambil dari: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/kemdikbud-gandeng-swasta-siapkan-sistem-belajar-daring>

Ministry of Education and Culture. (2020c). Mendikbud Siapkan Lima Strategi Pembelajaran Holistik. *Ministry of Education and Culture*. Diambil dari: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/mendikbud-siapkan-lima-strategi-pembelajaran-holistik>

Muttaqin, T. (2018). Determinants of Unequal Access to and Quality of Education in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*. 2(1). 1-20.

OECD. (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results of TALIS. OECD. Diambil dari: <https://www.oecd.org/berlin/43541636.pdf>

OECD (2017), The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264276147-e>

Olavia, L. (2020). Berkat Work From Home, Traffic Broadband Internet Telkomsel Naik 16%. *Beritasatu*. Diambil dari: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/617847-berkat-work-from-home-traffic-broadband-telkomsel-naik-16>

UNESCO (2020). Covid-19 Educational Disruption and Response. *UNESCO*. Diambil dari: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>

Rahman, M.A. (2016). Low Cost Private Schools A Case Study in Jakarta. Jakarta: *Center for Indonesian Policy Studies*. Diambil dari: https://docs.wixstatic.com/ugd/c95e5d_8f8d94c067174a9fa89b6152dbdd65ed.pdf

Statistics Indonesia. (2018). Statistik Telekomunikasi Indonesia. *BPS*: Jakarta. Diambil dari: <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Njc5OWYyM2RiMjJlOWJkY2Y1MmM4ZTAz&xzmnaHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmIkL3B1YmxyY2F0aW9uLzlwMTkvMTIvMDIvNjc5OWYyM2RiMjJlOWJkY2Y1MmM4ZTAzL3N0YXRpY3RpaY1OZWxlal29tdW5p2FzaS1pbmRvbVzaWEtMjAxC5odG1s&twoadfnarfeauf=MjAyMjAwNS0wNCAxMTY0dXQ%3D%3D>

Statistics Indonesia. (2020). Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019. BPS: Jakarta. Diambil dari: <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MWRlYjU4OGVmNWZkYmZiYTMzNDNiYjUx&xzm n=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMTk v M T E v M j k v M W R l Y j U 4 O G V m N W Z k Y m Z i Y T M z N D N i Y j U x L 3 B v d H J l d C 1 w Z W 5 k a W R p a 2 F u L X N 0 Y X R p c 3 R p a y 1 w Z W 5 k a W R p a 2 F u L W l u Z G 9 u Z X N p Y S 0 y M D E 5 L m h 0 b W w % 3 D & t w o a d f n o a r f e a u f = M j A y M C 0 w N C 0 x M i A w N z o 1 M j o z N Q % 3 D % 3 D>

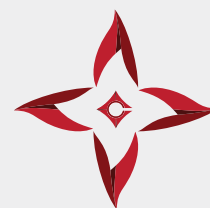
Tam, G., El-Azar, D. (2020). 3 Ways Coronavirus pandemic could reshape education. *World Economic Forum*. Diambil dari: <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3-ways-coronavirus-is-reshaping-education-and-what-changes-might-be-here-to-stay>

The World Bank. (2020). How countries are using edtech (including online learning, radio, television, texting) to support access to remote learning during the Covid-19 pandemic. *The World Bank*. Diambil dari: <https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-Covid-19-pandemic>

WHO. (2020). Rolling Updates on Covid-19 Disease Updated 14 April 2020. *WHO*. Diambil dari: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen>

Widodo, A., & Riandi. (2013). Dual-mode teacher professional development: challenges and re-visioning future TPD in Indonesia. *Teacher Development*, 17(3), 380-392.

Wikaningtyas, T.S. (2017). Providing Access to Quality Education through Low-Cost Private Schools A Case Study in Koja North Jakarta. Jakarta: *Center for Indonesian Policy Studies*. Diambil dari: https://docs.wixstatic.com/ugd/c7d5c3_0e6ff08d9ca746579eb7543b6cfe768c.pdf



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera.



Center for Indonesian Policy Studies



contact@cips-indonesia.org



Jalan Terogong Raya No. 6B Cilandak,
Jakarta Selatan 12430, Indonesia



www.cips-indonesia.org

Kerja kami bergantung pada dukungan Anda. Kunjungi www.cips-indonesia.org/donate untuk mendukung CIPS.

